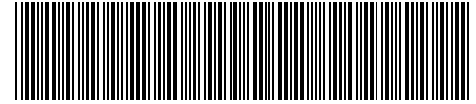




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.667783/2024**



DS:6117-8388-0037-2801

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
4. Kode>Nama Satker : (667783) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
- Sebesar : Rp. 691.001.000 ( ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SERIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

**Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	691.001.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN TANJUNG PINANG (009) Rp. 691.001.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 013.05.2.667783/2024**



DS:6117-8388-0037-2801

Satker : (667783) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

---

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	691.001.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	200.338.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	490.663.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**NOMOR : DIPA- 013.05.2.667783/2024**



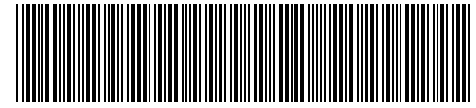
DS:6117-8388-0037-2801

Satker : (667783) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

---

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	691.001.000
BF.1582	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	Rp.	200.338.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.	490.663.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667783/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



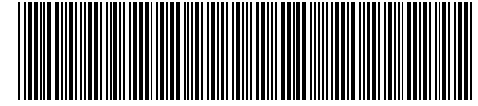
DS:6117-8388-0037-2801

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode>Nama Satker : (667783) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			691.001.000
Kegiatan	:	1582	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban			200.338.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase pengaduan yang diselesaikan			
		2. 02	Persentase pencegahan gangguan kamtib			
		3. 03	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib			
		4. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1582.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	200.338.000
Rincian Output	:	01 BHB.001	Operasi Penanganan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban	12,00	operasi	200.338.000
Kegiatan	:	5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			490.663.000
	:	1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			
		2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat			
		3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya			
		4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga			
		5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying			
		6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian			
		7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar			
		8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar			
		9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi			
		10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas			
		11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum			
		12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap			
		13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667783/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6117-8388-0037-2801

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode>Nama Satker : (667783) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- 14. 02 Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
- 15. 02 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
- 16. 03 Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
- 17. 03 Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
- 18. 03 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
- 19. 03 Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
- 20. 03 Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
- 21. 03 persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
- 22. 04 Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
- 23. 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 24. 04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
- 25. 04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- 26. 05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- 27. 05 Persentase tahanan/harapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 28. 06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- 29. 06 Persentase tahanan/harapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 30. 07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
- 31. 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- 32. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	44,00	orang	207.540.000
Rincian Output	01	:	AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	44.00	orang	207.540.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667783/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6117-8388-0037-2801

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode>Nama Satker : (667783) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : I A. 3

---

Klasifikasi Rincian Output	3	:	5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	11,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	283.123.000
Rincian Output		:	01	BDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasarakatan	11,00	Unit Kerja	283.123.000

---

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

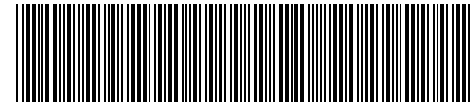
ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.05.2.667783/2024

I B. SUMBER DANA



DS:6117-8388-0037-2801

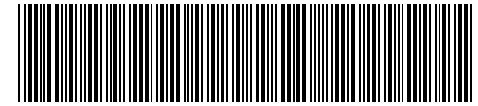
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
 Kode>Nama Satker : (667783) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	691.001.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	691.001.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667783/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6117-8388-0037-2801

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode>Nama Satker : (667783) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

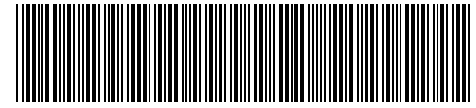
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667783	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	-	691.001	-	-	-	691.001		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	691.001	-	-	-	691.001		
1582	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	-	200.338	-	-	-	200.338		
1582.BHB	Operasi Bidang Keamanan (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	200.338	-	-	-	200.338	32 . 52	
01	RM	-	200.338	-	-	-	200.338	009	
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	490.663	-	-	-	490.663		
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	207.540	-	-	-	207.540	32 . 52	
01	RM	-	207.540	-	-	-	207.540	009	
5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	283.123	-	-	-	283.123	32 . 52	
01	RM	-	283.123	-	-	-	283.123	009	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>691.001</b>	-	-	-	<b>691.001</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667783/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6117-8388-0037-2801

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU  
Kode>Nama Satker : (667783) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667783	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	3.164	64.689	157.358	59.947	60.146	53.724	156.493	21.500	61.335	33.356	19.288	0	691.001
		<b>BELANJA BARANG</b>	3.164	64.689	157.358	59.947	60.146	53.724	156.493	21.500	61.335	33.356	19.288	0	691.001
	013.05.BF.1582	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	2.538	22.830	20.800	20.570	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	8.800	0	200.338
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.538	22.830	20.800	20.570	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	8.800	0	200.338
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	626	41.859	136.558	39.377	39.346	32.924	135.693	700	40.535	12.556	10.488	0	490.663
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	626	41.859	136.558	39.377	39.346	32.924	135.693	700	40.535	12.556	10.488	0	490.663

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667783/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:6117-8388-0037-2801

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU  
Kode dan Nama Satker : [667783] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

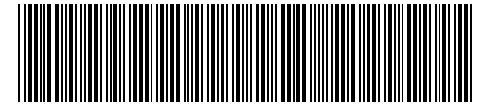
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667783/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:6117-8388-0037-2801

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU  
Kode dan Nama Satker : [667783] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>667783</b>	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU</b>		
<b>013.05.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		
<b>1582</b>	<b>Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban</b>		
<b>1582.BHB</b>	<b>Operasi Bidang Keamanan</b> Rp. 200.338		
521211	Belanja Bahan * Belanja ATK, Penggandaan Penjilidan dan Pelaporan serta Pembelian Bahan Pelaksanaan Kegiatan Rp. 507		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi * Belanja Barang Kegiatan Satgas kamtib berupa Hand Sanitizer, Masker dan sarung Tangan Latex Rp. 2.031		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa * Biaya Tiket Kapal Ferry Antar Kabupaten/Kota Antar Pulau dalam Propinsi, Biaya Taksi, Biaya Penginapan /Hotel, Biaya Uang Harian Rp. 184.600		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota * Biaya Transport Lokal Rp. 13.200		
<b>5252</b>	<b>Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</b>		
<b>5252.AEF</b>	<b>Sosialisasi dan Diseminasi</b> Rp. 207.540		
521211	Belanja Bahan * Pembelian bahan Kegiatan Sostek Berupa ATK, Seminar Kit, Penggandaan dan Penjilidan serta Pembuatan Banner Rp. 34.120 * Biaya Pembuatan Spanduk/Banner Rp. 2.800		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa * Biaya Tiket Pesawat Narasumber, Taksi Narasumber, Penginapan Narasumber, Tiket Kapal Peserta, Taksi Peserta, Penginapan Peserta Rp. 148.840		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota * Biaya Transport Lokal Peserta Rp. 21.780		
<b>5252.BDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b> Rp. 283.123		
521211	Belanja Bahan * Belanja ATK, Penggandaan dan Penjilidan Rp. 527		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa * Biaya Tiket Pesawat PP Jakarta Tanjungpinang, Biaya Taksi Jakarta, Rp. 192.856		
		524113	Biaya penginapan, Biaya Uang Harian * Belanja Tiket Kapal Antar Kabupaten/Kota, Biaya taksi, Biaya penginapan, Biaya Uang Harian Rp. 84.940 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota * Biaya Transportasi Lokal Rp. 4.800

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332